

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Penerapan GCG di Perseroan bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perseroan melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri, berlandaskan nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

The objective of GCG implementation in the Company is to maximize the value of the Company through a professional and an independent management, based on high moral traits and compliance with all applicable laws and regulations

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang maksimal adalah landasan penting bagi bisnis Perseroan yang berkelanjutan. Berkat penerapan GCG dengan standar tertinggi, Perseroan dapat memperkuat daya saing dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, antara lain pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemerintah setempat, pemerintah pusat, bahkan mitra kerja asing. Komitmen bersama ini tetap kami pegang teguh dan secara berkelanjutan diterapkan di setiap jenjang organisasi dan aktivitas bisnis yang selaras dengan pertumbuhan Perseroan. Penerapan GCG terbaik merupakan budaya Perseroan yang harus terus diperbaharui ke arah yang lebih baik dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PENERAPAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen Perseroan dan entitas anak. Perseroan secara konsisten berupaya mengelola seluruh aktivitas bisnis berdasarkan perkembangan terkini praktik GCG selaras dengan pertumbuhan Perseroan.

Perseroan juga senantiasa mendorong peningkatan implementasi prinsip-prinsip GCG dengan menciptakan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah menetapkan strategi dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG dengan melibatkan seluruh karyawan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi untuk mendukung kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan entitas anak.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A strong implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the foundation for the sustainability of our business. Due to our implementation of GCG with the highest standards, the Company can strengthen the competitiveness and gain trust from its stakeholders, including the shareholders, employees, communities, local government, central government, even foreign partners. This shared commitment will be continuously applied on all levels of the organization and business activities in line with the Company growth. The implementation of GCG best practices must be continuously updated and improved, to ensure that they always comply with the prevailing regulations.

BASIS OF IMPLEMENTATION

GCG is an inseparable part of the management of the Company and its subsidiaries. The Company consistently strives to manage all of its business activities based on the latest developments in GCG practices, in line with the Company's growth.

The Company is also continuously encouraging enhancement in the implementation of GCG principles by creating a culture that upholds the values of integrity, professionalism and compliance with the applicable regulations. Throughout 2014, the Company set out a strategy and improved its implementation of GCG principles by involving all employees on all levels of the organization to support the business and financial performance of the Company and its subsidiaries.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada lima prinsip implementasi sebagai berikut:

In implementing GCG, the Company refers to the the following five principles of implementation:

<p>Keterbukaan Transparency</p>	<p>Keterbukaan berkaitan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh Perseroan. Perseroan senantiasa menyediakan informasi yang jelas, akurat dan tepat. Prinsip keterbukaan mencakup transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan dalam penyajian (<i>disclosure</i>) informasi yang dimiliki Perseroan. Penerapannya ditandai dalam penyusunan dan penjelasan kepada publik terkait kinerja usaha dan keuangan secara berkala, rencana pengembangan bisnis, laporan keuangan berkala dan tahunan, hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan informasi lain yang wajib disampaikan oleh Perseroan sebagai perusahaan publik.</p>	<p>Transparency is related to the quality of information presented by the Company. The Company continues to provide clear, accurate, and precise information to concerned parties. The transparency principle includes transparency in the Company's decisionmaking processes and information disclosure. The transparency principle is implemented by the Company in the preparation of information to be disclosed to the public on a periodic basis related to business and financial performance, business plan development, periodic and annual financial statements, results of the General Meeting of Shareholders, and other information that must be disclosed by the Company as a listed company.</p>
<p>Akuntabilitas Accountability</p>	<p>Akuntabilitas mencerminkan sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, dan Direksi berdasarkan ukuran kinerjanya. Prinsip ini mencakup antara lain dengan mengoptimalkan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, serta evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang saham.</p>	<p>Accountability reflects the system that controls the relationship between the leadership units in the Company, such as the Board of Commissioners and the Board of Directors based on their performance assessment. These principles include, among others, optimizing the role of the Board of Commissioners in monitoring, evaluating and controlling the management in order to ensure the protection of shareholder value.</p>
<p>Tanggung jawab Responsibility</p>	<p>Perseroan senantiasa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dengan komitmen tinggi sebagai wujud tanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.</p>	<p>The Company continues to adhere to all applicable laws and regulations with a strong commitment as a form of its responsibility to the application of the good corporate governance principles.</p>
<p>Kemandirian Independence</p>	<p>Kemandirian merupakan prinsip yang menekankan pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perseroan.</p>	<p>Independence is a principle that emphasizes on the professional management of the Company without any conflict of interest and intervention from any party that is in conflict with the applicable regulations and the Company's corporate principles.</p>
<p>Kewajaran Fairness</p>	<p>Perseroan senantiasa menerapkan asas kesetaraan dan keadilan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pemenuhan hak-hak para pemegang saham Perseroan (<i>shareholders</i>) dan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang melakukan kerjasama dengan Perseroan.</p>	<p>The Company continues to apply the equality and fairness principles based on the agreement and the applicable regulations to fulfill the rights of the Company's shareholders and stakeholders who work closely with the Company.</p>

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di Perseroan bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perseroan melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri, berlandaskan nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ROADMAP GCG



Perseroan telah menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk roadmap guna memastikan GCG menjadi acuan dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan. Sasaran akhir *roadmap* GCG adalah terwujudnya Perseroan sebagai salah satu warga korporasi yang baik / *good corporate citizen*.

INFRASTRUKTUR GCG

Perseroan telah memiliki kelengkapan kebijakan yang mengatur pelaksanaan GCG yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada berbagai ketentuan yang ada. Pada 2014, Perseroan tengah menyempurnakan berbagai kelengkapan infrastruktur GCG yang dimiliki berlandaskan perkembangan terkini praktik GCG selaras dengan pertumbuhan Perseroan. Berbagai perangkat yang tengah disempurnakan oleh Perseroan di antaranya:

Panduan Tata Kelola (Code of Corporate Governance)

Panduan bagi manajemen dan seluruh jajaran Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG terbaik dalam kegiatan sehari-hari agar berdampak pada peningkatan nilai Perseroan di mata para pemangku kepentingan (stakeholders) dan para pemegang saham Perseroan (shareholders).

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVE

The objective of GCG implementation in the Company is to maximize the value of the Company through a professional and an independent management, based on high moral traits and compliance with all applicable laws and regulations.

GCG ROADMAP

The Company has determined the direction for its GCG implementation in the form of a roadmap, to ensure that GCG becomes a point of reference for any business activity carried out within the Company. The ultimate objective of the GCG roadmap is to ensure that the Company becomes a good corporate citizen.

GCG INFRASTRUCTURE

The Company has a set of policies regulating GCG implementation which has been properly prepared according to the Company's needs and refers to various conditions. In 2013, the Company was improving the range of GCG infrastructure based on the latest developments in GCG practices in line with the Company's growth. Various elements that are currently being improved by the Company include:

Corporate Governance Guidelines

Guidelines for the management and all elements of the Company to implement the best practices of GCG in day to day operations would impact on the higher Company's values in the eyes of stakeholders and shareholders.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Panduan Perilaku (Code of Conduct)

Panduan untuk setiap individu Perseroan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Isi panduan perilaku ini adalah visi, misi, serta komitmen dan praktik usaha Perseroan. Di dalamnya juga mencantumkan nilai-nilai utama Perseroan, seperti pedoman kerja organisasi, hubungan industrial dan usaha.

Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)

Panduan untuk Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Panduan ini adalah acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan utama GCG, organisasi Perseroan, kontrol internal dan kebijakan Perseroan.

Panduan Tata Kelola

Panduan bagi manajemen dan seluruh jajaran Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG terbaik dalam kegiatan sehari-hari agar berdampak pada peningkatan nilai Perseroan di mata para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan para pemegang saham Perseroan (*shareholders*).

Panduan Perilaku

Panduan untuk setiap individu Perseroan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Isi panduan perilaku ini adalah visi, misi, serta komitmen dan praktik usaha Perseroan. Di dalamnya juga mencantumkan nilai-nilai utama Perseroan, seperti pedoman kerja organisasi, hubungan industrial dan usaha.

Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Panduan untuk Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Panduan ini adalah acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan utama GCG, organisasi Perseroan, kontrol internal dan kebijakan Perseroan.

Code of Conduct

Guidelines for each individual in the Company to conduct their respective functions and roles. The contents are Company's vision, mission, commitment and business practices. It also comprises of the Company's core values, such as on organizational work guidelines, industrial and business relations.

Board Manual

Guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors that regulate working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners. These guidelines serve as references for the Board of Commissioners and Board of Directors to perform its supervision and management functions, which consists of principles and primary goals of GCG, corporate organizations, internal control, and Company policies.

Corporate Governance Guidelines

Guidelines for the management and all elements of the Company to implement the best practices of GCG in day to day operations would impact on the higher Company's values in the eyes of stakeholders and shareholders.

Code of Conduct

Guidelines for each individual in the Company to conduct their respective functions and roles. The contents are Company's vision, mission, commitment and business practices. It also comprises of the Company's core values, such as on organizational work guidelines, industrial and business relations.

Guideline for BOC and BOD (Board Manual)

Guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors that regulate working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners. These guidelines serve as references for the Board of Commissioners and Board of Directors to perform its supervision and management functions, which consists of principles and primary goals of GCG, corporate organizations, internal control, and Company policies.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

EVALUASI PENERAPAN GCG

Penilaian implementasi GCG Perseroan dilakukan secara internal (*self assessment*). Proses penilaian dilakukan terhadap seluruh organ Perseroan dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan. Laporan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dinilai oleh para pemegang saham Perseroan dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil evaluasi yang muncul akan menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyempurnaan.

Sebagai bentuk komitmen penerapan praktik terbaik GCG, pada tahun mendatang Perseroan akan melakukan penilaian GCG yang mengacu pada beberapa indikator utama seluruh Organ Perseroan yang dilakukan baik secara internal maupun oleh pihak independen.

STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN

Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas 2 (dua) organ, yaitu organ utama yang meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan organ pendukung yang meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Audit Internal.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. Pemegang saham mengambil keputusan terkait dengan kebijakan Perseroan dan penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan media para pemegang saham dalam mengambil keputusan terkait dengan seluruh kebijakan Perseroan. Ada 2 (dua) jenis RUPS yang dilakukan oleh Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Selama 2014, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPST.

EVALUATION OF GCG IMPLEMENTATION

The Company conducts periodical assessment of GCG implementation internally. The assessment process is performed on all organs of the Company by referring to the implementation of duties and responsibilities of each organ. The Report on the Performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners is assessed by the shareholders of the Company through the General Meeting of Shareholders (GMS). The evaluation results take the form of recommendations to be followed-up for improvement.

As a form of commitment to the implementation of GCG's best practices, the Company will assess its GCG performance against several key performance indicators applicable for all organs of the Company. This is conducted both internally and independently (independent parties).

GOVERNANCE STRUCTURE OF THE COMPANY

The Company's governance structure consists of 2 (two) types of organ, namely the main organ, i.e. the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Corporate Secretary, and the supporting organ that include the Audit Committee, the Remuneration Committee, and Internal Audit.

SHAREHOLDERS

The Shareholders are the Company's organ that possess the authority not given to the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Shareholders make decisions relating to the Company's policies and assess the Board of Commissioners and the Board of Directors through the General Meeting of Shareholders (GMS).

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a platform for the shareholders in making decisions related to the Company's policies. The Company recognizes two (2) GMS, i.e. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting Extraordinary (EGMS). In 2014, the Company only held one GMS, namely the AGMS.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) The Annual General Meeting of Shareholders which was held diselenggarakan oleh Perseroan pada 30 April 2014 dan by the Company on 30 April 2014, and had the following menghasilkan keputusan sebagai berikut: decisions:

1	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.</p> <p>Approved the Annual Report of the Company's Board of Directors and ratified the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year ended 31 December 2013.</p>
2	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebagaimana dimuat dalam Lapornya Nomor : R/185.AGA/rhp.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 (<i>acquit et decharge</i>), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 tersebut;</p> <p>Approved and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the fiscal year ended 31 December 2013 which had been audited by the Public Accounting Firm Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto as stipulated in its report No. R/185.AGA/rhp.3/2014 dated 25 March 2014, expressing unqualified opinion; and provided full release and discharge to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the fiscal year ended 31 December 2013 (<i>acquit et decharge</i>), to the extent that such actions were reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company's Consolidated Financial Report and its Subsidiaries for the fiscal year ended 31 December 2013.</p>
3	<p>A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar Rp691.140.238.187,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan. (ii) Sebesar Rp140.092.423.200,00 (seratus empat puluh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 12 Juni 2014, pukul 16.00 WIB. (iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. <p>B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.</p> <p>A. Approved the utilization of net profit of the Company for the fiscal year ended 31 December 2013 that amounted to Rp691,140,238,187 (six hundred and ninety one billion one hundred and forty million two hundred and thirty eight and one hundred eighty seven rupiahs), with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The amount of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs) was to be set aside as reserve; ii. The amount of Rp140,092,423,200.00 (one hundred forty billion ninety two million four hundred twenty three thousand two hundred rupiahs) was distributed as cash dividend, or at the amount of Rp30.00 (thirty rupiahs) per share, which will be paid to the Shareholders of the Company whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company on 12 June 2014 at 16:00 pm. iii. The remaining fund was recorded as the Company's unappropriated retained earnings. <p>B. Authorized the Board of Directors to distribute dividends and to perform all necessary actions. Dividend distribution will be made by taking into account tax provisions, the provisions of the Indonesia Stock Exchange and other prevailing capital market regulations;</p>

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

4	<p>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Buku-Buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah Honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Authorized the Board of Directors to select and appoint an independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ended 31 December 2014, with the provision that the Public Accountant be registered with the Financial Services Authority, and to determine the amount of fee and other terms of appointment according to the applicable regulations.</p>
5	<p>Menyetujui untuk mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; • Marseno Wirjosaputro sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; • Royanto Rizal sebagai Komisaris Perseroan; • William Jusman sebagai Komisaris Perseroan; • Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris Perseroan <p>Dan menyetujui mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arini Saraswaty Subianto sebagai Komisaris Perseroan. <p>Approved the reappointment of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hagianto Kumala as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company; • Marseno Wirjosaputro as Vice President Commissioner/Independent Commissioner of the Company; • Royanto Rizal as Commissioner of the Company; • William Jusman as Commissioner of the Company; • Steen Dahl Poulsen as Commissioner of the Company. <p>And approved the appointment of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arini Saraswaty Subianto as Commissioner of the Company.

Untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

For a period of 3 (three) years from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 the composition of the Board of Directors of the Company is set as follows:

Jabatan / Position	Nama / Name
Presiden Komisaris (Independen) / President Commissioner (Independent)	Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris (Independen) / Vice President Commissioner (Independent)	Marseno Wirjosaputro
Komisaris / Commissioner	Royanto Rizal
Komisaris / Commissioner	William Jusman
Komisaris / Commissioner	Steen Dahl Poulsen
Komisaris / Commissioner	Arini Saraswaty Subianto

Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

- Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan,

The honorarium for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been determined as follows:

- Amount of the honorarium of the Board of Commissioners of the Company amounting to Rp220,000,000.00 (two hundred twenty million rupiahs) per month prior to income tax deduction and one month of Holiday Allowance, with due attention to the applicable labor and taxation regulations effective since the closing of Meeting on 30

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan 30 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada 2015.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan 30 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada 2015.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

- Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen (cum):
 - a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 9 Juni 2014.
 - b. Perdagangan pada pasar tunai tanggal 12 Juni 2014.
- Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex):
 - a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Juni 2014.
 - b. Perdagangan pada pasar tunai tanggal 13 Juni 2014.
Tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 26 Juni 2014.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ utama Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberi masukan kepada Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan serta memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.

April 2014 up to the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders in 2015;

- Approved to grant power and authority to the President Commissioner to determine the formula of remuneration and amount of honorarium of each member of the Board of Commissioners, which will be decided in the meeting of the Board of Commissioners;
- Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the salary, allowances and other facilities for the members of the Company's Board of Directors, effective since the closing of the Company on 30 April 2014 up to the closing of the General Meeting of Shareholders held in 2015.

The schedule for the Distribution of Cash Dividend is as follows:

- The period of stock trading with dividend rights (cum):
 - a. Trading on the regular market and negotiation market dated 9 June 2014.
 - b. Trading on the cash market on 12 June 2014.
- The period of stock trading that does not contain a cash dividend (ex):
 - a. Trading on the regular market and negotiation market dated 10 June 2014.
 - b. Trading on the cash market on 13 June 2014.
Payment of cash dividends on 26 June 2014.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the Company's main organ whose collective duties and responsibilities are to supervise and advise the Board of Directors in running and managing the Company, as well as approving the Company's annual work and budget plan.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris per 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' composition as of 30 April 2014 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tangan Pertama Menjabat Date of Initial Appointment	Tanggal Pengukuhan Kembali Date of Re- Appointment	Masa Akhir Menjabat End of Term of Office
Hagianto Kumala	Presiden Komisaris dan Komisaris	27 Juni 2008	30 April 2014	RUPST 2017
Marseno Wirjosaputro	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	26 Juni 2001	30 April 2014	RUPST 2017
Royanto Rizal	Komisaris	23 Mei 2011	30 April 2014	RUPST 2017
William Jusman	Komisaris	27 Juni 2008	30 April 2014	RUPST 2017
Steen Dahl Poulsen	Komisaris	20 Juni 2007	30 April 2014	RUPST 2017
Arini Saraswaty Subianto	Komisaris	30 April 2014	30 April 2014	RUPST 2017

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan bahwa Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan jadwal yang telah ditentukan selama 2014.
2. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan berbagai informasi serta menyelaraskan berbagai tindakan korektif dan pencegahan untuk mendukung peningkatan kinerja usaha Perseroan.
3. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasannya selalu menaati prinsip-prinsip GCG agar Perseroan menjadi solid dan memiliki integritas yang baik. Dewan Komisaris juga memberikan dukungan kepada Direksi Perseroan dalam menjalankan kinerjanya agar memiliki prospek bisnis yang lebih baik sehingga berpotensi untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris serta dapat memiliki peluang untuk memperbesar skala bisnis Perseroan.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pursuant to Article 24 of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for the following duties and authorities:

1. The Board of Commissioners supervises Board of Directors in managing the Company and submits reports on its supervisory duties from the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders (GMS). As stated in Board of Commissioners' supervision report, the Meetings of the Board of Commissioners which had been held regularly were in accordance with the Company's needs and consistent with the determined schedules in 2014.
2. The Board of Commissioners studies the financial statements related to the Company's activities and information, coordinates various corrective acts and prevention to support business performance.
3. The Board of Commissioners complies with the GCG principles to create a solid Company with exceptional integrity. The Board of Commissioners supports the Board of Directors in performing its duties for better business prospect and opportunities to expand the Company's business scale.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi secara independen tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian Dewan Komisaris.

Frekuensi pertemuan dan kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Pada 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) untuk mengevaluasi, mengawasi pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi yang bermanfaat bagi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Attendance
Hagianto Kumala	Presiden Komisaris dan Komisaris / President Commissioner and Independent Commissioner	8/8
Marseno Wirjosaputro	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen / Vice President Commissioner and Independent Commissioner	8/8
Royanto Rizal	Komisaris / Commissioner	8/8
William Jusman	Komisaris / Commissioner	8/8
Steen Dahl Poulsen	Komisaris / Commissioner	8/8
Arini Saraswaty Subianto	Komisaris / Commissioner	2/8

DIREKSI

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk jangka panjang. Pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, dan pengelolaan prinsip kehati-hatian Perseroan demi kepentingan para Pemangku Kepentingan secara keseluruhan.

Susunan Direksi Perseroan

Berdasarkan RUPST yang diselenggarakan pada 30 April 2014, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners independently supervises the Company and the Board of Directors without intervention from any other parties which may affect its objectivity and independence of performance.

Board of Commissioners Meetings and Frequency of Attendance

In 2014, the Board of Commissioners held 8 (eight) meetings to evaluate and supervise the Company's management run by the Board of Directors and to provide advice to the Company's Board of Directors:

Board of Directors

The Board of Directors is an element of the Company's structure responsible for managing the Company for the interests and goals as stated in the Company's Articles of Association. The Board of Directors ensures the Company's business sustainability in accordance with the targets and the management under the principle of prudence for the interests of the Stakeholders.

Composition of the Board of Directors

Pursuant to the AGMS held on 30 April 2014, the composition of the Board of Directors is as follows:

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Nama / Name	Jabatan / Position	Tangan Pertama Menjabat / Date of Initial Appointment	Tanggal Pengukuhan Kembali / Date of Re-Appointment	Masa Akhir Menjabat / End of Term of Office
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur / President Director	26 Juni 2001	30 April 2014	RUPST 2016
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	12 Juni 2001	30 April 2014	RUPST 2016
The Jok Tung	Direktur / Director	8 Juni 2005	30 April 2014	RUPST 2016
Herman Gunadi	Direktur Independen / Unaffiliated Director	31 Oktober 2012	30 April 2014	RUPST 2016

Tugas dan Wewenang Direksi

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Frekuensi pertemuan dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2014, Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 20 (dua puluh) kali untuk mengevaluasi dan membahas kinerja Perseroan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan maupun di masing-masing entitas anak, yaitu sebagai berikut:

Duties and Authorities of the Board of Directors

Pursuant to Article 21 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors is responsible for performing the following duties and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for performing their duties for the Company's interest in achieving its goals and purposes.
2. Members of the Board of Directors shall with good faith and responsibility perform their duties in accordance with the applicable rules and regulations.

Board of Directors Meetings and Frequency of Attendance

During 2014, the Board of Directors held 20 (twenty) meetings to evaluate and provide input for the Company's performance and improvements to Good Corporate Governance implementation efficacy in the Company and its subsidiaries, as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Kehadiran / Attendance
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur / President Director	20/20
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	20/20
The Jok Tung	Direktur / Director	20/20
Herman Gunadi	Direktur Independen / Unaffiliated Director	20/20

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

HUBUNGAN AFILIASI

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensinya.

Antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

AFFILIATIONS

Members of the Board of Commissioners does not have any financial or managerial relations nor stock ownership with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or the Shareholders. The Board of Commissioners is not related to the Company that may affect its independence.

Members of the Board of Directors does not have any family relationships up to the third degree either vertically or horizontally including relations arising from marriage with the other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, as well as the Shareholders.

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with		
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholders
Hagianto Kumala	Presiden Komisaris (Independen) / President Commissioner (Independent)	-	-	-
Marseno Wirjosaputro	Wakil Presiden Komisaris (Independen) / Vice President Commissioner (Independent)	-	-	-
Royanto Rizal	Komisaris / Commissioner	-	-	-
William Jusman	Komisaris / Commissioner	-	-	-
Steen Dahl Poulsen	Komisaris / Commissioner	-	-	-
Arini Saraswaty Subianto	Komisaris / Commissioner	-	-	-
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur / President Director	-	-	Ada
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	-	-	-
The Jok Tung	Direktur / Director	-	-	-
Herman Gunadi	Direktur (Independen) / Unaffiliated Director	-	-	-

Johannes Suriadjaja adalah Pemegang saham PT Armand Investments Utama (AIU). AIU tercatat sebagai pemegang saham sebesar 9,59% per 31 Desember 2014.

Johannes Suriadjaja is a shareholder of PT Armand Investments Utama (AIU). AIU holds an ownership of 9.59% as of 31 December 2014.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi 2014

Selama 2014, masing-masing Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan program kerja tahunan.

Execution Duties and Authorities of Each Director in 2014

During 2014, the Board of Directors and the Board of Commissioners conducted 8 (eight) times joint meetings for the purpose of Company's strategy discussion.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Gabungan sebanyak 8 (delapan) kali untuk melakukan evaluasi rutin per kuartal dan membahas strategi perusahaan.

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners

During 2014, the Board of Directors and the Board of Commissioners conducted 8 (eight) times joint meetings for the purpose of Company's strategy discussion

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Kehadiran / Attendance
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur / President Director	8/8
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	8/8
The Jok Tung	Direktur / Director	8/8
Herman Gunadi	Direktur/Direktur Tidak Terafiliasi / Unaffiliated Director	8/8
Hagianto Kumala	Presiden Komisaris dan Komisaris / President Commissioner and Independent Commissioner	8/8
Marseno Wirjosaputro	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen / Vice President Commissioner and Independent Commissioner	8/8
Royanto Rizal	Komisaris / Commissioner	8/8
William Jusman	Komisaris / Commissioner	8/8
Steen Dahl Poulsen	Komisaris / Commissioner	8/8
Arini Saraswarty Subianto	Komisaris / Commissioner	2/8

PROSEDUR PENETAPAN DAN BESARAN RENUMERASI DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Prosedur penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi berdasarkan perkembangan skala usaha Perseroan dan diputuskan dalam RUPS. Penentuan besaran untuk Direksi disesuaikan dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komite Remunerasi berdasarkan kinerja individu.

PROCEDURE FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Remuneration Committee proposes the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the development of the Company's business scale and to be determined at the GMS. The amount of remuneration for the Board of Directors is adjusted to the performance assessment conducted by the Remuneration Committee based on individual progress.

Pada 2014, RUPST Perseroan telah menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per bulan, tidak termasuk pemotongan pajak penghasilan dan satu bulan Tunjangan Hari Raya dengan selalu memperhatikan perkembangan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 30 April 2014 sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

In 2014, the GMS approved the amount of honorarium to be Rp220,000,000.00 (two hundred and twenty million rupiahs) per month before income tax and Religious Holiday allowance for one month for each member of the Board of Directors, with due consideration of the prevailing labor and taxation regulations, and to be effective since the closing of the AGMS on 30 April 2014 up to the closing of the following AGMS to be held in 2015.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Kompensasi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada komisaris dan direksi Perusahaan berupa gaji, tunjangan dan bonus, masing-masing berjumlah Rp11.684.381.418 dan Rp12.350.932.507 pada tahun 2014 dan 2013.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit harus memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tugas Komite Audit lainnya diantaranya adalah mengelola struktur pengendalian risiko dengan baik, melaksanakan audit internal dan audit eksternal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen, serta tugas-tugas lain yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.

Profil Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Surat Edaran Bapepam-LK No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei juncto Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk Nomor: 03/PK-SSI/V/2014 tertanggal 23 Juni 2014. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Marseno Wirjosaputro

Anggota : • Candelario A. Tambis

• Mamat Ma'mun

Marseno Wirjosaputro / Ketua Komite Audit

Selain menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Marseno Wirjosaputro saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

The aggregate compensation in the form salaries, benefits, and bonuses provided by the Company to commissioners and directors amounted to Rp11,684,381,418 and Rp12,350,932,507 for the years 2014 and 2013 respectively.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is responsible for advising the Board of Commissioners on the reports or issues submitted by the Board of Directors, identifying substantial issues, and other related duties. The Audit Committee must ensure that the financial statements of the Company are presented fairly in accordance with the prevailing accounting principles. The Audit Committee ensures the effectiveness of the Company's internal control system and performs both internal and external audit in accordance with prevailing auditing standards, and follow up on auditing findings conducted by the management, and other tasks listed on the Audit Committee Charter.

Profile of Audit Committee

In line with the provisions of the Circular Letter of Bapepam-LK No. SE-03/PM/2000 on 5 May in conjunction with the Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5, Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. 29/PM/2004 on 24 September 2004 on the Establishment and Implementation Guidance for the Audit Committee, the Company has established an Audit Committee pursuant to the Circular Letter of the Board of Commissioners of PT Surya Semesta Internusa Tbk Number: 03/PK-SSI/V/2014 dated June 23, 2014. The composition of the Audit Committee is as follows:

Chairman : Marseno Wirjosaputro

Members : • Candelario A. Tambis

• Mamat Ma'mun

Marseno Wirjosaputro/Chairman of the Audit Committee

In addition to serving as Chairman of the Audit Committee, Marseno Wirjosaputro also serves as Vice President Commissioner/Independent Commissioner. His profile is available in the "Profile of the Board of Commissioners" section.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Candelario A. Tambis / Anggota

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2014, 79 tahun. Beliau menamatkan pendidikan S1 dengan meraih gelar sarjana akuntansi (BSBA). Beliau meraih gelar sertifikasi akuntan publik dari Certified Public Accountant (CPA) issued by the Professional Regulation Commission of the Republic of the Philippines. Merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Ferrarimas Italindo sejak tahun 2004-sekarang, dan menjabat sebagai Komite Audit PT Toyota Astra Financial Services sejak tahun 2012-sekarang. Memulai karirnya di PT Gonpu Indonesia sebagai Finance Director pada 1971-1982), tahun 1989-1990 di PT Dhanatunggal Utama sebagai Director, tahun 1991-1993 di PT Schroders I.M.I sebagai Executive Director, tahun 1993-1994 di PT Bank Universal sebagai Vice President, tahun 1990-1996 di PT Astra Securities sebagai Managing Director, dan di PT Deutsche Morgan Grenfell Astra pada tahun 1995-1998 sebagai Executive Director. Karir sebagai Anggota Komite dimulai di PT United Tractors Tbk dan PT Astra Graphia Tbk pada tahun 2001-2007, PT Astra Auto Parts Tbk tahun 2008-2009, PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2007-2011, PT Serasi Auto Raya tahun 2008-2012, dan PT Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2010-2012.

Mamat Ma'mun / Anggota

Adalah Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung, 10 Nopember 1945, 69 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas Padjajaran, Bandung. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Surya Semesta Internusa Tbk pada 2001-2007 dan menjabat kembali pada 2014. Beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Agro Multi Persada dari 2011-sekarang, Komisaris di PT Padang Karunia dari 2011-sekarang, Anggota Komite Audit di PT Adaro energy dari 2008-sekarang, Pengurus Dana Pensiun Triputra dari 2007-sekarang, dan Komisaris di PT Lemindo Abadi Jaya dari 2006-sekarang. Memulai karir di Astra pada tahun 1980 sebagai Accounting Dept-Head, tahun 1986 sebagai Accounting Division-Head, tahun 1990 sebagai Control Division-Head, tahun 1996-2005 sebagai Pengurus Dana Pensiun Astra. Kemudian melanjutkan karir di Triputra pada tahun 2006-2007 sebagai Advisor di Sahabat Group, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Duta Oto Prima, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Daya Anugerah Mandiri, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Dharma Group.

Candelario A. Tambis / Member

Serving as member of the Audit Committee since 2014. 79 years of age. He has concurrent positions namely as President Commissioner of PT Ferrarimas Italindo since 2004-now and as member of the Audit Committee of PT Toyota Astra Financial Services since 2012-now. He started his career at Deutsche Morgan Grenfell PT Astra in 1995-1998 as Executive Director, then in 1990-1996 worked at PT Astra Securities as Managing Director, in 1993-1994 at PT Bank Universal as Vice President, in 1991-1993 at PT Schroders IMI as Executive Director, in 1989-1990 at PT Dhanatunggal Utama as Director, and in 1971-1982 at PT Gonpu Indonesia as Finance Director. His career as committee member include at PT Delta Dunia Makmur Tbk in 2010-2012, PT United Tractors Tbk in 2009-April 2003, PT Serasi Auto Raya in 2008-2012, PT Astra Agro Lestari Tbk in 2007-2011, PT Astra Auto Parts Tbk in 2008-2009, PT United Tractors Tbk in 2001-2007, and PT Astra Graphia Tbk in 2001-2007, PT Astra Auto Parts Tbk tahun 2008-2009, PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2007-2011, PT Serasi Auto Raya tahun 2008-2012, dan PT Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2010-2012.

Mamat Ma'mun / Member

Indonesian citizen, born in London, 10 November 1945. 69 years of age. Obtained the Bachelor of Economics degree from Padjadjaran University, Bandung. He served as Member of the Audit Committee of PT Surya Semesta Internusa Tbk in 2001-2007 and was reappointed in 2014. He concurrently serves as Commissioner of PT Multi Agro Persada from 2011-present, Commissioner of PT Padang Karunia from 2011-present, Member of the Audit Committee of PT Adaro Energy from 2008-present, Triputra Pension Fund Board from 2007-present, and Commissioner of PT Lemindo Abadi Jaya from 2006-present. He started his career at Astra in 1980 as Accounting Dept. Head, then in 1986 as Accounting Division Head, in 1990 as Control Head Division, and in 1996-2005 as member of the Astra Pension Fund Board. He continued his career at Triputra in 2006-2007 as Advisor in Companion Group, in 2006-2011 as Commissioner of PT Duta Oto Prima, in 2006-2011 as Independent Commissioner of PT Power Award, and in 2006-2011 as a Commissioner of PT Dharma Group.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disahkan oleh Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk pada tanggal 4 September 2013. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Menelaah Informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Menelaah Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas Auditor Internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee performs their duties as stipulated in the Audit Committee Charter which has been approved by the Board of Commissioners of PT Surya Semesta Internusa Tbk on September 4, 2013. The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

- Assessing the financial information of the Company, such as projected financial statements and other financial information.
- Assessing the examinations conducted by internal auditor.
- Assessing the Company's compliance with the rules and regulations of the capital market and other provisions related to its business activities.
- Providing independent opinion in case of dispute between the management and the accountant regarding services rendered.
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a public accounting firm based on the principle of independence, the scope of the assignment, and the fees.
- Reviewing the implementation of the examination by internal auditors and oversee the implementation of the follow-up to the internal audit recommendations by the Board of Directors.
- Conducting periodic review of risk management activities undertaken by the Board of Directors, should the Company do not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
- Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners with regard to any potential conflict of interest arising in the Company.
- Maintaining confidentiality of documents, data, and information on the Company's employees, funds, assets, and resources of the Company as required.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Communicating directly with employees, including Directors and those who perform the function of internal audit, risk management and accounting, in relation to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- Involving independent external members of the Audit Committee as necessary to assist the implementation of its duties.
- Performing other duties as assigned by the Board of Commissioners.

Frekuensi pertemuan dan kehadiran Rapat Komite Audit

Selama 2014, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali untuk mengevaluasi dan memberi masukan demi efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan maupun di Surya Internusa Grup dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meetings and Attendance

During 2014, the Audit Committee conducted 8 (eight) meetings to evaluate and provide input to improve the effectiveness of GCG implementation in the Company or in the Surya Internusa Group, with the attendance as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Kehadiran / Attendance
Marseno Wirjosaputro	Ketua / Chairman	8/8
Candelario A. Tambis	Anggota / Member	3/8
Mamat Ma'mun	Anggota / Member	3/8

Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2014

Pada 2014, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Menelaah Laporan Keuangan Triwulan dan akhir tahun Perseroan.
- Mengevaluasi sistem akuntansi dan struktur pengendalian intern.
- Menilai efektivitas kerja satuan internal audit.
- Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Melakukan diskusi dengan auditor eksternal untuk membahas ruang lingkup, risiko dan rencana audit yang akan dilakukan oleh audit eksternal.
- Menelaah independensi auditor eksternal.

Execution of Audit Committee Duties in 2014

In 2014, the Audit Committee conducted the following activities:

- Reviewed the Quarterly Financial Reports and year-end report of the Company.
- Evaluated the accounting system and internal control structure.
- Assessed the effectiveness of the internal audit unit.
- Reviewed the Company's compliance with the prevailing capital market laws and regulations and other regulations related to the Company's business activities.
- Conducted discussions with the external auditor to discuss the audit scope, risk and plan to be performed by the external auditor.
- Reviewed the independence of the external auditor.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Adapun hasil evaluasi Komite Audit berdasarkan kegiatan tersebut adalah:

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Perseroan tidak melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal maupun bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

KOMITE REMUNERASI

Guna penunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk tertanggal 8 Juni 2011.

Susunan Anggota Komite Remunerasi

Ketua : Hagiato Kumala
Anggota : Marseno Wirjosaputro
Anggota : Royanto Rizal

Hagiato Kumala / Ketua

Selain menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi, Hagiato Kumala saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Marseno Wirjosaputro / Anggota

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi, Marseno Wirjosaputro saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris. Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Royanto Rizal / Anggota

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi, Royanto Rizal saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

The evaluation results from the above Audit Committee activities are as follows:

- a. The Financial Statements of the Company for the fiscal year 2014 have been presented in accordance with the applicable accounting standards and with the applicable laws and regulations in Indonesia.
- b. The Company did not engage in activities that violate the laws and regulations of the capital market and other regulations that govern the Company's business activities.

REMUNERATION COMMITTEE

To support the Board of Commissioners in carrying out its duties and authorities, the Company established the Remuneration Committee pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of PT Surya Semesta Internusa Tbk dated 8 June 2011.

Composition of the Remuneration Committee

Chairman : Hagiato Kumala
Member : Marseno Wirjosaputro
Member : Royanto Rizal

Hagiato Kumala / Chairman

In addition to serving as the Chairman of the Remuneration Committee, Hagiato Kumala also serves as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. His profile is available in the "Profile of the Board of Commissioners" section.

Marseno Wirjosaputro / Member

In addition to serving as member of the Remuneration Committee, Marseno Wirjosaputro also serves as the Vice President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. His profile is available in the "Profile of the Board of Commissioners" section.

Royanto Rizal / Member

In addition to serving as member of the Remuneration Committee, Rizal Royanto also serves as Commissioner of the Company. His profile is available in the "Profile of the Board of Commissioners" section.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Komite Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam penentuan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan perkembangan skala usaha Perseroan. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Frekuensi pertemuan dan kehadiran Rapat Komite Remunerasi

Pada 2014, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali untuk mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan Komite Remunerasi untuk melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Frekuensi kehadiran Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

Duties and responsibilities of the Remuneration Committee

The Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in determining the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the development of the Company's business scale. The Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners of the Company.

Remuneration Committee Meetings and Attendance

In 2014, the Remuneration Committee held 1 (one) meeting to propose the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors. This meeting was in accordance with the provisions of the Company's Remuneration Committee, which requires that a Remuneration Committee meeting is conducted at least 1 (once) a year. The attendance of the members of the Remuneration Committee in the meeting is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Kehadiran / Attendance
Hagianto Kumala	Ketua / Chairman	1/1
Marseno Wirjosaputro	Anggota / Member	1/1
Royanto Rizal	Anggota / Member	1/1

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi 2014

Pada 2014, Komite Remunerasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam penyiapan usulan remunerasi anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham.

Execution of the Remuneration Committee Duties in 2014

In 2014, the Remuneration Committee assisted the Board of Commissioners in preparing the proposal for remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be brought to the Shareholders.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan penyelenggara kegiatan korporat dan penghubung Perseroan dengan regulator dan lembaga-lembaga lain, baik kalangan investor, masyarakat luas dan *stakeholders* lainnya. Pada 2014, Bapak Eddy Purwana Wikanta menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary acts as a liaison between the Company and the public to fulfill the Company's responsibilities as a public company in respect to good corporate governance (GCG) principles and the Company's adherence with all applicable regulations. In 2014, the position of Corporate Secretary was held by Eddy Purwana Wikanta.

Profil Sekretaris Perusahaan

Eddy Purwana Wikanta

Selain menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, Eddy Purwana Wikanta saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Direksi.

Corporate Secretary Profile

Eddy Purwana Wikanta

In addition to serving as Corporate Secretary, Eddy Purwana Wikanta also serves as Vice President Director of the Company. His profile is available in the "Profile of the Board of Directors" section.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal dan juga sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam, Bursa, dan masyarakat.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Komite dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2014

Sepanjang tahun 2014, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelaporan Registrasi Bulanan Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia (Jan-Nov. 2014) melalui fasilitas e-Reporting.
2. Menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada rapat Direksi secara berkala dan rencana kerja Perseroan dan Entitas Anak untuk lima tahunan.
3. Melaksanakan keterbukaan informasi mengenai perkembangan dan tindakan korporasi yang perlu disampaikan kepada pemegang saham, investor dan masyarakat Indonesia melalui Bapepam/OJK dan PT Bursa Efek Indonesia.
4. Penyelenggaraan RUPST untuk pertanggungjawaban tahun buku 2013, pada tanggal 30 April 2014 di Gran Melia Jakarta.
5. Menyampaikan informasi terkait perkembangan Perseroan melalui Siaran Pers sebanyak 8 (delapan) kali.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

- Following the developments in the capital market, specifically in relation to the capital market regulations.
- Furnishing the public with all information required by investors as well as serving as a liaison between the Company and the Financial Services Authority, the Stock Exchange and the public.
- Coordinating and conducting meetings of the Board of Commissioners, the Committees and the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2014

In 2014, some activities carried out by the Corporate Secretary are as follows:

1. Conducted Monthly Report on the Registration of Securities to the Indonesia Stock Exchange (January-November 2014) through the e-Reporting facility.
2. Provided input to the meetings of the Board of Directors periodically and in relation to the Company's and its subsidiaries' five-year work plan.
3. Disclosed information regarding corporate development and actions that are required to be reported to shareholders, investors and the public through the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange.
4. Held the AGMS for the fiscal year of 2013 on 30 April 2014 at Gran Melia Hotel, Jakarta.
5. Submitted information in relations to the Company updates through Press Release, 8 submissions.

Siaran Pers

Press Releases

No	Tanggal / Date	Siaran pers / Press Release
1	1 April 2014	SSIA membukukan laba bersih konsolidasi 2013 yang mencapai Rp691 miliar SSIA consolidated net profit of Rp691 billion in 2013
2	30 April 2014	SSIA menyelenggarakan Public Expose untuk pertanggungjawaban tahun buku 2013 SSIA conducted Public Expose for the fiscal year of 2013
3	9 Mei 2014	SSIA pada kuartal pertama 2014 mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp918 miliar SSIA recorded revenue amounting to Rp918 billion in the first quarter of 2014
4	26 Agustus 2014	SSIA pada semester pertama 2014 membukukan pendapatan usaha dan laba bersih masing-masing Rp2.180 miliar dan Rp189 miliar SSIA recorded revenue and net income of Rp2,180 billion and Rp189 billion, respectively, in the first half of 2014
5	18 September 2014	SSIA meluncurkan Suryacipta Square Tahap I dengan total investasi Rp227 miliar SSIA launched the Suryacipta Square First Phase with a total investment of Rp227 billion
6	September 2014	SSIA memperoleh izin lokasi seluas 2.000 hektar di Kabupaten Subang, Jawa Barat SSIA obtained the location license for its 2,000-hectare site in Subang, West Java

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

No	Tanggal / Date	Siaran pers / Press Release
7	16 Oktober 2014	SSIA meraih kontrak baru sebesar Rp2,35 triliun dan membukukan penjualan lahan seluas 22,8 hektar untuk periode 9 bulan 2014 SSIA were awarded new contracts amounting to Rp2.35 trillion and sold 22.8 hectares of land within the first nine months of 2014
8	3 November 2014	SSIA membukukan pendapatan sebesar Rp3.254 miliar dan laba bersih sebesar Rp228,5 miliar untuk periode 9 bulan 2014 SSIA posted a revenue of Rp3,254 billion and net income of Rp228.5 billion within the first nine months in 2014

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Salah satu tugas pokok manajemen Perseroan adalah mengelola dan mengamankan nilai investasi dan kekayaan Perseroan. Sistem pengendalian internal yang andal sangat dibutuhkan untuk membantu tugas tersebut. Perseroan telah menyusun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal berupa serangkaian kebijakan dan prosedur standar dalam menjalankan setiap kebijakan operasionalnya serta sistem informasi dan pelaporan untuk menunjang pengambilan keputusan Manajemen. Sistem ini terus mengalami penyempurnaan dan hingga saat ini dinilai cukup efektif untuk mengendalikan dan meminimalkan risiko yang ada dan juga Perseroan secara rutin mengadakan Tinjauan Manajemen Kuartalan dengan seluruh lini usaha sebagai sarana pengendalian dan juga berfungsi sebagai "alat peringatan dini" (*early warning signal*) sehingga langkah antisipasi (*counter actions*) dapat segera diambil. Namun demikian, Perseroan juga menyadari bahwa hal ini tidak menjamin tidak adanya tindakan penyelewengan atau tidak ada risiko sama sekali.

Adalah tugas Audit Internal untuk memastikan sistem pengendalian internal yang ada sudah baik dan efektif dijalankan di setiap lini usaha, sesuai dengan misi yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, yaitu untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen serta memberikan layanan konsultatif dalam hal keefektifan dan kecukupan pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Selama tahun 2014, reviu atas efektifitas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Audit Internal telah dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

- Penyusunan rencana audit tahunan untuk audit unit-unit usaha (Entitas Anak) baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya, dan telah diselesaikannya seluruh penugasan audit sesuai rencana;
- Lingkup audit meliputi pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;

INTERNAL CONTROL SYSTEM

One of the main duties of the Company's management is to manage and secure the Company's assets and investments. A reliable Internal Control System is highly required to support these duties. The Company has established and maintained an Internal Control System in the form of a set of policies and standard procedures in performing every operational policy as well as information system and reporting, to support decision making process. This system is continuously improved and is now considered to be effective in controlling and minimizing risks. Furthermore, the Company regularly conducts Quarterly Management Review with all business units as a means to control the activities and serve as an early warning signal so that proper actions can immediately be taken. However, the Company also realizes that this system does not necessarily mean that it is guaranteed that there will be no violation occurring in the Company or that there are no risks at all.

The Internal Audit Unit is assigned to ensure that the existing internal control system has been implemented effectively and well in all business lines, in accordance with the mission outlined in the Internal Audit Charter, that is to increase added value and improve the Company's operational system through systematic approach by examining, evaluating and increasing the effectiveness of risk management system, internal control adequacy, and good corporate governance.

In 2014, the review of the Internal Control System conducted by Internal Audit implemented the following:

- Arranged the annual audit plan for business units, headquarters and branch offices, whereby all audit tasks were successfully performed as planned;
- The audit scope included examining and evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control system and compliance with laws and regulations;

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- Penilaian atas efektifitas dan efisiensi di beberapa bidang seperti keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya serta pendeteksian atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan;
 - Pemberian saran perbaikan atas sistem pengendalian internal yang diperlukan, serta pembahasan bersama Direktur dan jajaran manajemen terkait;
 - Pemantauan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati;
 - Penyusunan dan pelaporan hasil audit beserta tindak lanjutnya kepada Direktur Utama Perseroan;
 - Evaluasi mutu Audit Internal yang dilakukan dan penyempurnaan program audit, audit teknik, sistem pelaporan maupun meningkatkan kompetensi para auditor.
- Assessed the effectiveness and efficiency of areas such as finance, accounting, operations, and other activities as well as detection of possible violation or fraud;
 - Suggested improvements to the internal control system that are required, as well as discussed this issue with the Board of Directors and related management team;
 - Monitored the improvements that had been suggested;
 - Prepared and reported the audit results and follow-up to the Board of Directors;
 - Evaluated internal audit implementation to enhance the audit program, audit techniques, reporting systems, and improved the competence of internal auditors.

Sistem Pengendalian Operasional dan Keuangan

Perseroan melakukan evaluasi pengendalian operasional dan keuangan Perusahaan di bawah pengawasan dan dengan partisipasi dari manajemen. Berdasarkan evaluasi ini, Manajemen menyimpulkan bahwa pada 31 Desember 2013, pengendalian pengendalian operasional keuangan perusahaan telah efektif.

UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Unit Audit Internal bekerja berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang merupakan pedoman dalam mengatur struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik serta hubungan kerja dengan pihak terkait. Piagam Audit Internal telah disahkan oleh Presiden Direktur dan disetujui oleh Presiden Komisaris pada tanggal 23 Desember 2009, dan menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Operational and Financial Control System

The Company evaluated its operational and financial control system under the supervision and with the participation of the management. Based on this evaluation, the management concluded that as at 31 December 2013, the operational and financial control systems of the Company was effective.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit provides assurance and consulting function that is independent and objective with the aim to increase the value and improve the operations of the Company, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes. The Internal Audit Unit performs under the guidelines stipulated in the Internal Audit Charter, a set of guidelines that regulate the structure and position, duties and responsibilities, authorities, code of ethics and work relationships between Internal Audit and related parties. The Internal Audit Charter was authorized by the President Director and approved by the President Commissioner on 23 December 2009, and became a reference in performing all internal audit activities to create an effective internal control system.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Struktur, Kedudukan dan Pertanggung jawaban Unit Audit Internal

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

Pada akhir tahun 2014, Unit Audit Internal Perseroan dikepalai oleh I Ketut Asta Wibawa, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. 166L/JSUEPW/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, dan sebelumnya yang bersangkutan telah berpengalaman sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan sebagai Finance Manager di PT Bali Telekom di Jakarta.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;

Structure, Status and Accountability of Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit, who can be appointed and dismissed by the President Director upon the approval of the Board of Commissioners.

The Board of Directors may dismiss the Head of Internal Audit after obtaining the approval of the Board of Commissioners, should the Head of Internal Audit do not have the qualifications to serve as internal auditor as set forth in the Audit Committee Charter and or fail to do so or be incapable to run the task.

The Head of Internal Audit is responsible to the President Director. The Auditors in the Internal Audit Unit are responsible directly to the Head of Internal Audit. The auditors are prohibited from holding a position related to the operations of the Company or its subsidiaries.

At the end of 2014, Internal Audit Unit, headed by I Ketut Asta Wibawa, appointed by the Decree of the Board of Directors No. 166L/JSUEPW/XII/2009 on 23 December 2009. He previously had been employed as auditor at a public accounting firm in Jakarta and as Finance Manager at PT Bali Telekom in Jakarta.

Duties And Responsibilities Of The Internal Audit Unit

- Arranging and implementing annual internal audit plans;
- Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policies;
- Performing inspection and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
- Suggesting improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;
- Creating audit report and submitting the report to the President Director and the Board of Commissioners;
- Monitoring, analyzing and reporting on implementation of improvements that have been suggested;
- Cooperating with the Audit Committee;

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Laporan Akuntabilitas dan Kegiatan Audit Internal tahun 2014

Pada tahun 2014, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama Perseroan dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menyampaikan hasil penelaahan atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dari proses operasi Unit-unit usaha (Entitas Anak) yang diaudit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan.
- Melaporkan isu penting sehubungan dengan pengendalian internal Entitas Anak, dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.
- Secara berkala menyampaikan status & hasil atas Rencana Audit Tahunan dan kecukupan sumber daya Unit.
- Melakukan komunikasi dengan fungsi pengendalian lainnya yang ada (komite audit, auditor eksternal, dan lain-lain).

AUDIT EKSTERNAL

Penunjukan Auditor Eksternal diputuskan dalam RUPS berdasarkan kompetensi dan reputasi Auditor Eksternal. Pada 2014, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, RSM AAJ Associates.

KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, RSM AAJ Associates telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan

- h. Compiling a program to evaluate the quality of internal audit activities conducted; and
- i. Conducting special inspections if necessary.

Internal Audit Unit's Authorities are

- a. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
- b. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners and or the Audit Committee and member of the Board of Directors, or the Board of Commissioners and the Audit Committee;
- c. Conduct meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and or the Audit Committee on a regular as well as ad-hoc basis; and
- d. Coordinated its activities with the external auditors' activities.

Internal Audit Activity and Accountability Report 2014

In 2014, the Internal Audit Unit executed its duties and reported its accountability to the President Director, which consist of the following:

- Delivered the review of internal control adequacy and effectiveness for the operations of business units (subsidiaries) that were audited according to the Annual Audit Plan.
- Reported issues that were critical to the internal control of the subsidiaries, and provided the recommendations necessary for improvements.
- Periodically conveyed the status and results on the Annual Audit Plan and the adequacy of resources in the business units.
- Communicated with other existing control functions (Audit Committee, external auditors, and others).

EXTERNAL AUDIT

The appointment of External Auditor is decided at the AGMS based on the competence and reputation of the External Auditor. In 2014, the Company appointed the Public Accounting Firm (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, RSM AAJ Associates.

KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, RSM AAJ Associates has audited the financial statements of the Company since 2011.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

sejak tahun 2011. Selain jasa audit, KAP tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan. Menurut peraturan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk auditor eksternal yang sama untuk 6 (enam) tahun berturut-turut, dan Akuntan Publik Bersertifikat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk mengaudit pembukuan.

Selain akuntan independen, Perseroan juga menggunakan jasa profesional dari institusi profesi penunjang pasar modal lainnya, antara lain konsultan hukum, jasa penilai, aktuaris, lembaga peneringkat. Jumlah pembayaran keseluruhan untuk jasa institusi tersebut pada tahun 2014 adalah sekitar Rp13,8 miliar.

MANAJEMEN RISIKO

Beberapa risiko yang dihadapi Perseroan diantaranya:

- **Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku**
Risiko kenaikan harga bahan/material proyek termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik, gas, dan upah minimum regional akan mengakibatkan penurunan keuntungan proyek, karena sesuai dengan sifat bisnis jasa konstruksi dimana nilai kontrak suatu proyek ditetapkan di awal kontrak sedangkan realisasi untung atau rugi dari proyek tersebut baru akan diketahui setelah penyerahan proyek yaitu pada saat masa kontrak selesai. Masa kontrak adalah rata-rata antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun bergantung pada skala besarnya proyek. Sehingga dengan demikian kenaikan harga selama masa kontrak merupakan risiko dari kontraktor.

Selain itu, ketersediaan bahan baku juga dipengaruhi oleh lokasi proyek dan lokasi pengambilan bahan baku, di mana ada beberapa jenis bahan baku yang perlu didatangkan dari daerah atau pulau lain, yang sering kali mengalami kendala cuaca, dan juga adanya kebijakan pemerintah dalam proses penyediaan bahan baku impor. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku ini dapat berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

Untuk mengatasi risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan baku, Perseroan melakukan komitmen pembelian bahan baku di muka sebelum proyek konstruksi dimulai.

Aside from the audit services, the KAP has not rendered any other services to the Company. According to the relevant regulations, the Company may appoint the same external auditor for at most 6 (six) consecutive years, and a Certified Public Accountant for three (3) consecutive years to audit its books.

In addition to the independent accountant, the Company also used other professional services of professional institutions which support capital markets, i.e. legal consultant, appraiser, actuary, rating agencies. The amount for the services rendered in 2014 was around Rp13.8 billion.

RISK MANAGEMENT

Some of the risks that are faced by the Company are:

- **Risk of Price Increase and Raw Material Availability**
The Increased Price of project resources/material including fuel, basic rate of electricity, gas and regional's minimum wage will contribute to the decrease of project's profit. Because based on the nature of construction business, a value of a project is determined on the beginning of a contract, whereas the realization of the profit and loss will only be discovered on the project completion, which is when the contract ends. The average length of contracts are between 6 months to 2 years, depends on the size of the project. Therefore, the risk of increased price occurred during the contract period is a risk from contractors.

Further, availability of raw material is dependent on the location of the project and supply. Certain raw materials need to be transported from other regions or islands, and for such transportation, weather conditions and government actions or policies towards imported goods may serve as obstacles. Price increase and raw material availability will contribute a negative impact on the Company's operational and financial performance as well as its business prospect.

To mitigate the risk of rising prices and limited availability of raw materials, the Company enters into purchase agreements for raw materials in advance prior to the commencement of construction projects.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

• Risiko dari kolektibilitas piutang

Sebagian besar usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak berkaitan dengan usaha jasa konstruksi, dimana pembayaran dilakukan oleh pelanggan dilaksanakan secara bertahap. Apabila piutang atas pembayaran-pembayaran tersebut tidak dapat tertagih maka akan menurunkan kinerja Perseroan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kolektibilitas piutang, maka langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Melihat reputasi dan kemampuan bayar dari pemberi kerja
2. Mensyaratkan uang muka proyek
3. Mensyaratkan *progress payment*
4. Melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

• Risiko Perubahan Kurs

Perseroan dan entitas anak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dikarenakan transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan, pembelian, kas, dan setara kas serta pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perseroan dan entitas anak mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mengusahakan *natural hedging*, salah satunya adalah dengan cara melakukan pinjaman mata uang asing apabila pendapatannya juga dalam mata uang asing. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pengamatan terhadap fluktuasi mata uang asing sehingga dapat melakukan tindakan tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing seperti penggunaan transaksi lindung nilai.

• Risiko Gugatan Hukum

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Entitas Anak. Tuntutan hukum tersebut dapat terjadi di semua tingkatan manajemen. Antisipasi dari risiko hukum ini antara lain dengan kesiapan SDM yang andal di bidang hukum, pengacara profesional untuk menghadapi kasus tuntutan hukum, dan pembenahan administrasi serta perangkat hukum yang dimiliki Perseroan.

• Risk of Receivables Collectibility

The main businesses engaged by the Company and its subsidiaries are mostly related to the construction industry, in which payments by buyers occur gradually. In case the Company's receivables are uncollectible, the Company's performance may be hampered. To minimize the build up of this receivables collectibility risk, the Company had taken efforts such as:

1. Examining the reputation and solvency of customers,
2. Requiring for project downpayments to be made,
3. Enacting the policy of progressive payment,
4. Conducting regular supervision to reduce credit risk exposure.

• Risk of Exchange Rate Fluctuation

The Company and its subsidiaries are exposed to the effects of foreign currency exchange rate fluctuation, mainly arising from foreign currency-denominated transactions and balances, such as purchases, sales, cash and cash equivalents, and loans denominated in foreign currencies. The Company and its subsidiaries manage its foreign currency exposure by adopting natural hedging, where possible, among others by obtaining foreign currency denominated loans only when the earnings are also denominated in foreign currencies. In addition, the Company and its subsidiaries also manage foreign currency exposure by monitoring fluctuations in the foreign currency exchange rate, in order to perform the appropriate actions, if necessary, to mitigate foreign currency risk, such as by means of hedging.

• Risk of Litigation

As a legal entity, the Company cannot be separated from the possibility of facing litigations from third parties aimed at the Company and its subsidiaries. In general, the incidence of such litigation may occur as a result of activity at any level of management. Efforts are made to anticipate legal risk, such as the preparation of a reliable legal department, working with legal counsel and professional lawyers in facing litigation cases, and reforming the administrative and legal mechanisms within by the Company.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Evaluasi Sistem Manajemen Risiko

Perseroan melakukan evaluasi sistem manajemen risiko di bawah pengawasan dan dengan partisipasi dari manajemen Perusahaan. Berdasarkan evaluasi ini, Manajemen menyimpulkan bahwa pada 31 Desember 2014, Sistem Manajemen Risiko perusahaan telah berjalan efektif.

KASUS LITIGASI DAN PERKARA HUKUM

Sepanjang tahun 2014, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang signifikan baik yang melibatkan Dewan Komisaris maupun Direksi.

PAKTA INTEGRITAS / CODE OF CONDUCT

Perseroan melaksanakan pakta integritas secara konsisten sebagai budaya kerja dalam seluruh aktivitas Perseroan. Pakta Integritas tersebut diimplementasikan oleh seluruh individu Perseroan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan. Pakta Integritas juga berlaku bagi Entitas Anak, perusahaan afiliasi, pihak ketiga, dan seluruh mitra kerja.

KEPATUHAN PAJAK

Perseroan senantiasa patuh dan taat pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta menjalankan Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 74/PMK.13/2012, sebagai berikut:

- Perseroan menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir secara tepat waktu.
- Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- Perseroan tidak menerima hukuman atas tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 20 tahun terakhir.
- Perseroan melakukan audit terhadap laporan keuangan selama 2 tahun terakhir melalui Akuntan Publik terpercaya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

AKSES INFORMASI

Perseroan sebagai perusahaan publik dan dalam upaya melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, melalui Sekretaris Perseroan telah menyediakan sarana untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung melalui media internet atau *website* dengan alamat situs www.suryainternusa.com.

Evaluation of Risk Management System

The Company evaluated its risk management system under the supervision and with the participation of the management. Based on this evaluation, the Management concluded that as at 31 December 2014, the Company's Risk Management System was effective.

LITIGATIONS

Throughout 2014, the Company did not face any significant legal case involving any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

STATEMENT OF INTEGRITY (CODE OF CONDUCT)

The Company consistently puts the statement of integrity into action as a work culture in all of its activities. The Statement of Integrity is implemented by all elements within the Company including its Shareholders, the Board of Directors, the Board of Directors, and all employees. The Statement of Integrity also applies to all subsidiaries, affiliated companies, third parties, and business partners.

TAX COMPLIANCE

The Company always complies with the applicable taxation rules and regulations and performs the Regulation of the Minister of Finance No. 74/PMK.13/2012, with the details as follows:

- The Company submits its Tax Forms for all types of tax in the last two years on time.
- The Company has no outstanding taxes of any type.
- The Company has not been sanctioned for any taxation violation within the last 20 years.
- The Company has assigned a public accounting firm to audit the Company's books in an accurate and transparent manner, obtaining unqualified opinion for the last two years.

ACCESS TO INFORMATION

As a listed company, and in the effort to implement information disclosure, Corporate Secretary has provided various media which public may access to obtain data and information directly via its corporate website, www.suryainternusa.com.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pada 2014 Perseroan tengah mematangkan konsep *whistleblowing system* (WBS) dan diharapkan dapat segera diterapkan di tahun-tahun mendatang. Konsep WBS Perseroan diarahkan untuk memungkinkan setiap orang dalam membuat dan menyampaikan laporan pelanggaran serta kecurangan yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Perseroan mendesain konsep WBS sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang mengedepankan prinsip transparansi dengan memberikan jaminan keamanan bagi pelapor. Perseroan akan memastikan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan tetap menerima serta menindaklanjuti laporan anonim, dan memberikan perlindungan bagi pelapor dari tindakan balasan pelapor.

Tujuan WBS

Konsep WBS yang Perseroan aplikasikan bertujuan untuk:

- Pengungkapan permasalahan yang tidak sesuai dengan pedoman etika Perseroan (*Code of Conduct*).
- Penjaminan adanya mekanisme penyelesaian permasalahan secara efektif.
- Mendorong terciptanya citra positif Perseroan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab.

Ruang Lingkup WBS

Ruang lingkup kebijakan WBS meliputi tindakan yang melanggar *code of conduct* yang berpotensi merugikan Perseroan baik secara finansial maupun yang bersifat merusak reputasi Perseroan. Pihak pelapor adalah pihak internal Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan serta *stakeholders* lainnya yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Perseroan. Pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelanggar meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan.

Mekanisme Kebijakan WBS

Pengaduan pelanggaran disampaikan secara lisan maupun tulisan. Perseroan akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan apakah pengaduan yang disampaikan benar dan terbukti untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi terhadap kasus yang diadukan, kemudian diproses berdasarkan peraturan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

In line with its application of GCG principles, the Company in 2014 developed the Whistleblowing System (WBS) which is expected to be implemented in the near future. The concept of the Company's WBS is aimed at allowing everyone in submitting reports of violation and fraud that occurred in the Company.

The Company formulates its concept of WBS as mechanism for reporting violations (whistleblowing) that emphasizes the principle of transparency by providing security to the whistleblower. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and will even receive and follow up anonymous reports, and provides protection to the whistleblowers from the possibility of reprisal.

WBS Objectives

The WBS concept that the Company is currently preparing has the objectives to:

- Disclose various issues not in accordance with the Company's Code of Conduct;
- Ensure an effective case resolution mechanism;
- Foster the Company's positive image as a responsible business entity.

WBS Scope

The scope of the WBS policy covers violation of the code of conduct that may harm the Company's finances or reputation. The whistleblower may be from within the Company, such as the Board of Directors or employees, or other stakeholders of the Company. The parties that may be reported as offenders include members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees.

Mechanism of WBS Policy

Whistleblowing reports may be submitted orally or in writing. The Company will verify the report to ensure whether or not it is factual and has sufficient evidence to be followed up with the investigation process. The investigation then proceeds to process the case under the applicable rules, with the following conditions:

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

- Kasus pidana
Hasil investigasi dicatat dan dituangkan dalam laporan. Apabila pelanggar terbukti bersalah, kami berikan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Diserahkan kepada pihak yang berwenang.
 - b. Diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan kesalahan pelanggar.
- Kasus non pidana
Setiap kasus pelanggaran non pidana akan kami catat dan tuangkan dalam laporan. Terhadap pelanggar yang terbukti bersalah, kami berikan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Diserahkan kepada pihak yang berwenang.
 - b. Diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan kesalahan pelanggar.
- Criminal Cases
The results of investigations carried out by security are displayed in BAP. Against offenders found guilty, we provide the following policies:
 - a. Handing over to local police;
 - b. Amicably resolving by considering the offenders' mistakes.
- Non-Criminal Cases
The Company records and outlines each case of non-criminal violation in the report. Against the offenders who have been found guilty, the following actions were taken:
 - a. Handing over to local police;
 - b. Amicably resolving by considering the offenders' mistakes.